

Jebakan Paternalistik Perempuan Nahdlatul Ulama Dalam Kancah Perpolitikan Nasional

Ainna Amalia FN

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Kertosono Nganjuk, Indonesia

ainnamalia@gmail.com

Abstract

Compared to previous years, women's participation in the political arena in the country in the last few years increased significantly. In the 2019 national elections, at the central level, 16 political parties had won a 30 percent quota for women candidates. This is certainly our appreciation, although the representation of women's representation at the provincial and district/city levels is still far from ideal. Likewise with the participation of female representatives from Nahdlatul Ulama. The results of the 2019 elections were quite significant changes, both representative from Fatayat and Muslimat. However, this significant increase in terms of numbers left a trap that seemed to entwine other NU women in the arena of national politics. Many NU women who opposed and issued him out of the ordinary, even raised in the discussion room, were unable to NU politics that adopted a system of the breed, dynasty, and over budgeting. Successful NU women "have no clear breed" have to settle for playing in the periphery of political space.

Keywords: *Paternalistic trap, Nahdlatul Ulama, Nasional Politics*

Abstrak

Dibanding tahun-tahun sebelumnya, partisipasi perempuan dalam kancah politik di tanah air, beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada pemilu nasional tahun 2019 ini, di tingkat pusat, ada 16 partai politik yang sudah berhasil memenuhi 30 persen kuota untuk caleg perempuan. Hal ini tentu patut kita apresiasi, meskipun representasi keterwakilan perempuan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota masih jauh dari ideal. Begitu juga dengan partisipasi kader perempuan dari Nahdlatul Ulama. Hasil dari pemilu tahun 2019 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, baik kader yang dari Fatayat maupun Muslimat. Akan tetapi, kenaikan yang cukup signifikan dari segi jumlah ini, menyisakan jebakan yang terkesan membelit kiprah perempuan NU lain dalam kancah perpolitikan nasional. Banyak perempuan-perempuan NU yang pemikiran dan gagasannya luar biasa, bahkan dibesarkan dalam ruang aktivis, tidak sanggup menembus tembok tebal politik NU yang menganut sistem trah, dinasti dan *over budgeting*. Perempuan-perempuan NU hebat yang kebetulan "tidak memiliki trah yang jelas" harus puas bermain dalam ruang politik pinggiran.

Kata Kunci: *Jebakan Paternalistik, Nahdlatul Ulama Politik Nasional*

Pendahuluan

Partisipasi perempuan dalam kancah politik di tanah air beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada

pemilihan umum nasional tahun 2019 ini, ada 16 partai politik yang sudah berhasil memenuhi 30 persen kuota untuk calon legislatif perempuan di tingkat pusat. Hal ini tentu patut diapresiasi, meskipun representasi keterwakilan perempuan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota masih jauh dari ideal.

Upaya menaikkan representasi dan partisipasi perempuan dalam ranah politik di tanah air, sebenarnya sudah dilakukan dengan maksimal. Namun hasilnya masih jauh dari target. Kondisi ini, menurut data inter Parliamentary Union (IPU) menempatkan Indonesia pada posisi keenam di level ASEAN. Sementara di level dunia, Indonesia menduduki peringkat ke 89 dari 168 negara. Berada jauh dibawah Pakistan, timor Leste, Afganistan dan Vietnam.¹

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas dengan jumlah anggota terbesar di Indonesia, juga memiliki kiprah politik yang besar di kancah politik Nasional, termasuk kader perempuannya. Sejak pemilu pertama pada tahun 1955, kehadiran NU dalam politik sangat intensif. Pada saat itu NU menjadi Partai NU yang memperoleh suara 12, 2% lebih besar dibandingkan dengan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang hanya memperoleh 7,5%. Suara politik NU hanya kalah dengan Masyumi yang mencapai 26,5%, kalah dengan Partai Nasionalis Indonesia pimpinan Soekarno.² Partai NU bisa mempertahankan eksistensinya hingga pemilu selanjutnya di masa rezim politik Orde Baru. Namun sejak Pemilu 1971, suara politik NU dialihkan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai hasil fusi dari partai Islam Masyumi, Parmusi, Sarekat Islam dan NU sendiri.³

Di dalam tubuh NU sendiri, kader perempuan yang berkiprah dalam perpolitikan nasional juga mengalami kenaikan jumlah kuantitasnya. Pemilu 2019 yang barusan berlangsung, menunjukkan bahwa partisipasi perempuan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Di parlemen tingkat pusat saja, saat ini kader fatayat sebanyak 9 orang yang melenggang ke senayan. Mereka semua kader NU potensial yang menggenapi kuota 30 persen perempuan.⁴ Namun pertanyaannya kemudian, apakah kenaikan jumlah ini benar-

¹ Inter-Parliamentary Union. (2017). Women in Politics: 2017 | Inter-Parliamentary Union.

² S. Roviana. Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), (2014). 403. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.403-424>

³ A SayutiWasino, & I. Sodiq Dinamika Politik Partai Nahdlatul Ulama Di Semarang Tahun 1952-1979. *Journal of Indonesian History*, 7(1), 1–11. Muhammad Ilham Gilang. (2018). Dasar Negara Islam Atau Pancasila : Sikap Politik Partai Nahdlatul Ulama Dalam Majelis Konstituante. *Jurnal Candrasangkala Pendidikan Sejarah*, 4(1), (2018). 49–69.

⁴ JPNN. 2019-2024?, Pengin Tahu Berapa Kader Fatayat NU jadi Anggota DPR. *JPNN*. Retrieved from <https://www.jpnn.com/news/pengin-tahu-berapa-kader-fatayat-nu-jadi-anggota-dpr-2019-2024>

benar mencerminkan kualitas kader perempuan NU? Apakah juga bisa menjadi cermin bahwa sesungguhnya posisi dan peran perempuan NU sudah sangat berdaya dan memberdayakan kamanusiaan? Dan sudah cukup siapkah kultur masyarakat NU dengan munculnya kader-kader perempuannya berkiprah dalam kancah perpolitikan nasional? Jawaban dari pertanyaan ini tentu membutuhkan kajian yang serius dan komprehensif.

Membincang peran politik NU, kini tidak lagi terkait dengan politik praktis yang identik dengan perebutan kekuasaan. Namun pada tataran politik kebangsaan dan kerakyatan. Meskipun dalam sejarahnya NU pernah menjadi sebuah partai politik terbesar ke 3 dalam memenangkan pemilu pada tahun 1955. Dinamika gagasan di tubuh NU telah menyepakati bersama untuk kembali ke khittah 1926 dengan menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang sepenuhnya mengabdikan diri pada umat. Keputusan itu diambil melalui musyawarah nasional Alim Ulama NU di Pondok Pesantren Salafiah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur pada tanggal 13-16 Robi’ul Awwal 1404 H/18-21 Desember 1983.⁵

Sejak saat itu NU kembali ke barak dan steril dari atribut politik praktis. Akan tetapi, pada prakteknya, tidak mudah melepaskan NU dari kungkungan politik praktis. Karena NU selalu hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka NU memiliki kekuatan politik dalam peran-peran kebangsaan. Sehingga, politik NU bisa bermakna gerak langkah yang sesekali bisa bersinggungan dengan pemerintah, masyarakat, agama dan politik. NU berinteraksi dengan politik praktis, terlihat pada saat ada pemilu baik legislatif maupun eksekutif. Karena dukungan NU memiliki kekuatan politik yang luar biasa. Belum lagi jika ada pengurus NU yang menjadi pengurus parpol, kemudian mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun menjadi eksekutif. Oleh karenanya, untuk menyalurkan syahwat politik NU yang fluktuatif, pada saat reformasi bergulir, dari rahim NU lahir partai baru yang diberi nama PKB. Partai ini untuk menyalurkan kepentingan NU di ranah politik praktis. Selain PKB, ada partai PPP. Dua partai ini menjadi dua kekuatan yang secara *genuine* memiliki genealogi kekuatan politik NU .

Meskipun sudah ada partai yang mewadahi kepentingan politik NU, sebagai ormas yang berkomitmen dan bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, NU secara fakta kerap telibat di kancah politik nasional. *Khittah* NU bisa dimaknai dengan “*adagium*” terlarang berpolitik dengan membawa NU secara kelembagaan. Namun jika personal

⁵ N. Faizin. NAHDLATUL UIAMA (NU) DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL: Studi Kasus pada PEMILUKADA di Kabupaten Sumenep Tahun 2010. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(2), (2017), 51. <https://doi.org/10.14421/jsr.v11i2.1352>

warga NU boleh masuk dan berkiprah dalam dunia politik. Meminjam istilah KH. Muchith Muzadi, NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Dengan kata lain, orang NU bahkan pengurus NU, secara perorangan boleh bergabung dengan partai politik tertentu, tapi dilarang keras membawa nama NU. Kalimat ini cukup gamblang tapi aplikasinya sangat *absurd*. Sehingga langkah politik yang ditempuh NU dalam berbagai even politik selalu menimbulkan pro dan kontra. Sebab, bagaimana mungkin memisahkan antara figur seorang ketua NU dan jabatan yang disandangnya dalam ranah permainan politik. KH. Abdullah Syamsul Arifin yang menjadi Cawabub Jember, Guntur Ariyadi, Ali Maschan Moesa yang menjadi Cawagub Jatim, Soenaryo, KH. Hasyim Muzadi yang menjadi Cawapres Megawati Soekarno Putri dan yang paling *gress*, KH Ma'ruf Amin yang menjadi wakil presiden berpasangan dengan Presiden Jokowi di periode kedua. Demikian juga tokoh kunci atau ketua NU lain, yang maju dalam perhelatan politik, mereka semua tetap tidak bisa dilepaskan dari posisinya selaku pengurus NU, kendati sudah non aktif. Di manapun mereka berkampanye, mesti dikaitkan dengan NU. Akhirnya, mau tidak mau institusi NU juga terseret di keriuhan politik praktis.⁶

Patut diakui, sampai detik ini NU masih memiliki magnet yang kuat untuk menjadi komoditas politik. NU masih dianggap sebagai alat propaganda yang efektif dalam mendulang suara dalam masyarakat. Terutama pada saat musim pilihan legislatif, Pemilukada maupun pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada saat itu para kontestan, banyak yang membawa nama NU dalam baliho atau spanduk kampanyenya, mulai dari yang sekedar menempelkan logo NU hingga yang mengklaim sebagai putra asli NU. Ini menunjukkan bahwa NU dinilai masih mempunyai potensi politik yang cukup besar. Terlepas dari itu semua, NU memang harus mengkonstruksi ulang posisi sekaligus peran politiknya di masa yang akan datang. Tidak mungkin NU lepas dari “bermain” politik praktis, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Massa NU yang besar jumlahnya adalah modal politik yang cukup signifikan. Lebih baik modal politik itu dikelola dan dimanfaatkan sendiri untuk kepentingan NU, dari pada dimanfaatkan orang lain yang mengatasnamakan NU, tapi ujung-ujungnya tidak jelas pembelaannya terhadap NU.⁷

⁶ F. Muhammad. Dinamika pemikiran dan gerakan politik nahdlatul ulama. *KALAM*, 10(2), (2017), 57. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.320>

⁷ NU. (n.d.). merekonstruksi peran politik nu. Retrieved from <https://www.nu.or.id/post/read/49983/merekonstruksi-peran-politik-nu>

Perempuan NU Di Panggung Politik

Panggung yang dipilih NU sebagai politik kebangsaan dan politik kerakyatan dipandang cukup strategis menjaga marwah NU. Namun tidak melarang kadernya masuk dalam politik kekuasaan. Banyak kader potensial NU yang berpartisipasi dalam perayaan pesta demokrasi, termasuk para kader perempuannya. Peluang politik kader perempuan NU dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terlebih dengan adanya aturan pemenuhan kuota 30 persen untuk perempuan sebagai implementasi dari politik gender. Berdasarkan catatan PPP dan PKB, sejak pemilu 2009 telah memiliki aturan tertulis dalam AD/ART partai tentang sistem kuota dalam kepengurusan partai. Aturan yang dibuat ini tentu menunjukkan adanya keselarasan antara partai dengan ide dan gagasan NU dalam memperjuangkan politik kesetaraan gender, dimana wacana dan perjuangan gender di lingkungan NU, untuk saat ini bukan hal yang kontroversi lagi, melainkan melebur dalam perjuangan keumatan NU.⁸

Relitas ini menunjukkan bahwa partai politik, dalam hal ini PKB dan PPP sudah sangat terbuka terhadap peran para kader perempuan NU. Sinergitas dan akselerasi kekuatan politik NU dalam ruang terbuka politik gender yang lebih setara menumbuhkan optimisme terhadap agenda kepartaian kedepan yang lebih berkeadilan gender. Sehingga partai-partai yang digawangi kader NU memang telah menorehkan sejarah tentang perubahan substansial demokratisasi kita, yakni dengan konsep keadilan gender dalam aturan parpol. Namun pertanyaannya, sudah siapkah kader perempuan NU bertarung di panggung politik kekuasaan? Salah satu indikator kesiapan kader perempuan NU, salah satunya bisa dilihat dari jumlah dan potensi kader perempuan NU di partai politik. Tahun 2009, PPP memiliki 5 anggota perempuan dari 38 anggota DPR setara 13,2% di DPR RI, sedangkan PKB memiliki 7 dari 38 anggota DPR setara 25% kursi. Untuk pemilu 2019, PKB memiliki anggota legislatif dari perempuan sejumlah 20,7% sedang PPP 26,3%. Jumlah ini memang belum mencapai kuota, tapi paling tidak mengalami kenaikan dibanding Pemilu sebelumnya.⁹

⁸ I. A. Achmad. Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik. *Jurist-Diction*, 1(1), (2018), 164–181. A. S. Azmy, & I. A. Farhah. Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD). *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 15(1), (2019), 75–83. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.10396>

⁹ Maria, A., Quintarti, L., & Djou, G. Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik dan Pemilu Serempak. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(3), (2018), 601–610.

Keterwakilan perempuan dalam politik kekuasaan itu mensyaratkan asas partisipasi, representasi dan akuntabilitas. Sehingga keterwakilan perempuan dalam politik kekuasaan dan berbagai kebijakan yang diambil bermuara pada keadilan gender.¹⁰ Keterwakilan ini sangatlah penting, karena hanya perempuan yang mampu, memahami, merasakan dan berempati terhadap masalah dan aspirasi kaum perempuan. Dari sini, gagasan afirmasi kuota terhadap keterwakilan perempuan termasuk kader NU dalam kancalah politik nasional, menemukan relevansiya. Akan tetapi ada beberapa persoalan mengenai representasi perempuan dalam politik di Indonesia. Menurut Philips J Vermonte, persoalan *pertama* mengenai hubungan perempuan dan partai sendiri yang masih timpang sehingga demokrasi berlangsung tidak sehat. *Kedua*, kualitas internal partai memiliki pengaruh terhadap proses rekrutmen, seleksi dan regenerasi politisi. *Ketiga*, terkait dengan kualitas individu politisi yang masih rendah.¹¹

Sederet persoalan terkait representasi perempuan, seharusnya dijawab oleh partai politik. Karena parpol memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas perempuan dalam kancalah politik praktis tanah air. Partai politik menjadi kawah candra dimuka penciptaan kesetaraan dan keadilan gender. Kualitas dan kuantitas adalah dua hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka mendorong partisipasi perempuan di dalam politik. Partai politik harus bisa membebaskan dirinya dari anggapan bahwa politik adalah ranah maskulin yang hanya pantas untuk laki-laki. Sedangkan perempuan tidak cocok di kancalah politik. Oleh sebab itu perlu dibangun kesadaran gender dalam berpolitik, baik bagi perempuan sendiri maupun laki-laki. Kesadaran ini diharapkan bisa meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan diri perempuan dalam politik serta membuka peluang selebar-lebarnya bagi perempuan untuk berperan aktif dalam dunia politik tanpa adanya diskriminasi.

Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, parpol juga harus memperbarui sistem perekrutan kader, pemberdayaan kader, serta sistem pemilu yang diterapkan. Karena berhasil tidaknya kebijakan afirmasi kuota perempuan, salah satunya tergantung sistem perekrutan di parpol ini. Jika di lini ini gagal, maka bisa dipastikan, pemenuhan kuota perempuan, hanya sebatas menggugurkan syarat partai politik untuk dapat mengikuti pemilu. Bukan pemberlakuan politik gender yang sebenarnya. Hal ini justru semakin mengukuhkan bahwa perempuan hanya menjadi objek

¹⁰ Nur Agustin, M. Partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo Dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 3(4), (2016).

¹¹ Maria, at al. Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik dan Pemilu Serempak

semata. Tujuan dari kebijakan afirmasi tentunya tidak akan tercapai ketika sistem yang mengatur tidak mendukung perempuan untuk beraktualisasi dan berkembang.¹²

Beberapa kendala partisipasi perempuan termasuk kader NU berkiprah dalam politik di Indonesia menurut Khofifah ada beberapa faktor, yaitu: (1) budaya patriarki masyarakat Indonesia yang cenderung masih mengutamakan laki-laki dalam ranah politik, (2) proses seleksi dalam partai yang hanya dilakukan oleh elite partai yang mayoritas laki-laki sehingga pengkaderan terkesan masih bias gender, (3) media yang belum berpihak pada perempuan, (4) kurangnya jaringan antar organisasi massa, LSM, dan partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan dalam ranah politik, (5) kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan para perempuan sehingga belum banyak figur perempuan yang memenuhi kualifikasi sebagai legislator atau sebagai kepala daerah, (6) faktor keluarga yang menghambat aktivitas politik perempuan.¹³

Terbukanya kesempatan dan afirmasi bagi perempuan kader NU untuk terjun dalam politik praktis, terkadang tidak sinergis dengan kesiapan kultur masyarakat NU sendiri dalam berpolitik. Banyak perempuan-perempuan luar biasa potensinya, baik dari segi pemikiran dan gagasan bahkan dibesarkan dalam ruang aktivis ternyata tidak dapat menembus tebalnya dinding politik NU yang mengedepankan sistem trah-isme, dinastisme dan over budgeting. Para perempuan-perempuan hebat yang tidak memiliki garis keturunan trah kyai ini, akhirnya hanya puas “bermain” dalam ruang politik pinggiran. Mereka tidak mendapat mandate secara politik strategis dalam mengelola negara ini. Budaya paternalistik masih kuat mengakar dalam alam bawah sadar masyarakat NU. Hal ini melahirkan budaya elitis politik NU di tubuh NU sendiri yang lambat laun bisa menggerus pemikiran dan gagasan politik gender sebagai basic capital dalam pertarungan politik.¹⁴

Jebakan Paternalistik Masyarakat NU

Budaya dan pemikiran yang berkembang di tubuh NU tidak lahir dalam ruang hampa. Semuanya tumbuh dan bersemai dari budaya paternalistik masyarakat yang kuat. Budaya ini mempengaruhi sikap dan gerakan politik kader NU, termasuk para

¹² A. Nurcahyo. Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(1), (2016), 25. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>

¹³ Khofifah Indar Parawansa. Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. *S T U D I K a S U S*, (1987) 41–52. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3702.8566>

¹⁴ Nur Agustin, M. Partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo Dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 3(4), (2016).

perempuannya. Budaya patriarki menggambarkan tingginya dominasi laki-laki atas perempuan dalam berbagai hal dan cenderung menutup akses dan kesempatan perempuan. Budaya ini menganggap perempuan lemah dan memantaskan posisi perempuan hanya pada peran domestik. Kondisi semacam ini membuat partisipasi perempuan di dunia politik menjadi tidak maksimal, karena kesempatan dibatasi dan perempuan sendiri akhirnya merasa tidak pantas berada dalam panggung politik. Padahal keterwakilan perempuan dalam legislatif diyakini mampu menghilangkan bias-bias dalam penetapan regulasi yang menyangkut hajad hidup kelompok perempuan.¹⁵

Selain itu, paternalistik biasanya lahir dari budaya patriarki. Yaitu budaya yang cenderung mem-patron-kan tokoh tertentu dalam hal ini adalah laki-laki. Semua harus tunduk dan patuh pada keputusan patron. Termasuk dalam masalah politik. Perempuan dalam budaya patron menjadi pihak yang sangat dirugikan. Karena terjadi proses marginalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan dalam perannya di dunia politik. Dalam tradisi NU, meskipun sudah mengenal wacana gender, namun dalam praktek berpolitik, terkadang masih terselip praktik-praktik diskriminasi dan marginalisasi ini. Kader perempuan NU yang aktif dalam berorganisasi, belum tentu mendapat tiket penuh untuk tampil memegang peran-peran strategis dalam kancah politik kekuasaan. Karena ada syarat tambahan yang harus dimiliki oleh para kader perempuan ini, yaitu memiliki garis keturunan dengan kyai. Sehingga perempuan dalam berpolitik mengalami beban ganda agar dapat menduduki posisi strategis kekuasaan. salah satunya adalah memiliki garis leturunan kyai. Apabila ada perempuan NU yang potensi namun tidak ada garis keturunan kyai, akan sulit direkom oleh NU untuk menduduki jabatan strategis dalam kekuasaan. Mereka hanya puas bermain dilevel pinggiran dari politik kekuasaan.

Faktor lain yang menjadi penghalang keterwakilan perempuan adalah adanya subordinasi gender. Subordinasi terhadap perempuan bermakna bahwa perempuan tidak memiliki peluang untuk mengambil keputusan bahkan yang menyangkut dirinya. Perempuan diharuskan tunduk pada keputusan yang diambil oleh laki-laki. Sehingga ruang gerak mereka menjadi sangat konvensional dan seringkali dipandang tidak layak menjad politisi. Berdasarkan hal ini, gagasan gender menjadi wacana penting yang harus diusung kader-kader NU. Gagasan gender tersebut menghendaki adanya wawasan gender dan keterlibatan perempuan dalam ruang publik. Terbitnya buku "*Uqud al Lujayn*"

¹⁵ Muhammad, M. Nahdhatul Ulama Dan Perubahan Budaya Politik Di Indonesia. *El-HARAKAH* (2010). <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.444>

dengan tafsir baru telah memperkaya wacana gender di lingkungan NU. Pembacaan terhadap teks senantiasa didasarkan kepada semangat tujuan syari'at (maqashid al syariah) yang memberikan ruang bagi kesetaraan dan keadilan gender.¹⁶

Oleh karena itu, pendidikan politik yang berwawasan gender perlu dilakukan secara terus menerus oleh partai politik, termasuk PKB dan PPP sebagai parpol yang identik dengan NU. Pendidikan politik ini sebagai suatu proses tertanamnya nilai-nilai politik yang berkeadilan gender. Parpol dipandang cukup strategis melakukan peran ini karena sebagai saluran aspirasi dan partisipasi politik, parpol memiliki kontribusi dalam melakukan rekrutmen jabatan politik. Melalui rekrutmen jabatan politik yang berwawasan gender, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam politik. Partai politik bertanggung jawab dalam menempatkan perempuan pada posisi dan tanggung jawab organisatoris yang signifikan, selain mempersiapkan dan menempatkan perempuan sebagai caleg yang setara dengan caleg laki-laki .

Kesimpulan

Peran kader perempuan NU dalam kancah politik kekuasaan di tanah air mengalami proses kesejarahan yang panjang. Secara kualitas dan kuantitas, partisipasi perempuan dalam kancah politik di tanah air, terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini tentu patut kita apresiasi. Begitu juga dengan partisipasi kader perempuan dari Nahdlatul Ulama. Hasil dari pemilu tahun 2019 lalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, baik kader yang dari Fatayat maupun Muslimat. Akan tetapi, kenaikan yang cukup signifikan dari segi jumlah ini, menyisakan jebakan yang terkesan membelit kiprah perempuan NU lain dalam kancah perpolitikan nasional. Banyak perempuan-perempuan NU yang pemikiran dan gagasannya luar biasa, bahkan dibesarkan dalam ruang aktivis, tidak sanggup menembus tembok tebal politik NU yang menganut sistem trah, dinasti dan *over budgeting*. Perempuan-perempuan NU hebat yang kebetulan “tidak memiliki trah yang jelas” Mereka terjebak oleh budaya patriarki yang masih melekat pada alam bawah sadar masyarakat NU sendiri.

¹⁶ L. D. Eriyanti. Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(1), (2017), 69. <https://doi.org/10.22146/jsp.18002>

Daftar Pustaka

- Achmad, I. A. Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik. *Jurist-Diction*, 1(1), (2018), 164–181.
- Azmy, A. S., & Farhah, I. A. Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD). *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 15(1), (2019), 75–83. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.10396>
- Eriyanti, L. D. Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(1), (2017), 69. <https://doi.org/10.22146/jsp.18002>
- Faizin, N. nahdlatul ulama (nu) dalam dinamika politik lokal: Studi Kasus pada Pemilukada di Kabupaten Sumenep Tahun 2010. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(2), (2017). 51. <https://doi.org/10.14421/jsr.v11i2.1352>
- JPNN. 2019-2024?, Pengin Tahu Berapa Kader Fatayat NU jadi Anggota DPR. *JPNN*. Retrieved from <https://www.jpnn.com/news/pengin-tahu-berapa-kader-fatayat-nu-jadi-anggota-dpr-2019-2024>
- Parawansa, Khofifah Indar. Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. *S T U D I A S U S I A*, 1(1), (1987) 41–52. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3702.8566>
- Maria, A., Quintarti, L., & Djou, G. Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik dan Pemilu Serempak. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(3), (2018), 601–610.
- Muhammad, F. Dinamika pemikiran dan gerakan politik nahdlatul ulama. *KALAM*, 10(2), (2017), 57. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.320>
- Muhammad, M. Nahdhatul Ulama Dan Perubahan Budaya Politik Di Indonesia. *El-HARAKAH* (2010). <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.444>
- Muhammad Ilham Gilang. Dasar Negara Islam Atau Pancasila : Sikap Politik Partai Nahdlatul Ulama Dalam Majelis Konstituante. *Jurnal Candrasangkala Pendidikan Sejarah*, 4(1), (2018). 49–69.
- NU. (n.d.). merekonstruksi peran politik nu. Retrieved from <https://www.nu.or.id/post/read/49983/merekonstruksi-peran-politik-nu>
- Nur Agustin, M. Partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo Dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 3(4), (2016).
- Nurcahyo, A. Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(1), (2016), 25. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>
- Roviana, S. Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), (2014), 403. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.403-424>
- Sayuti, A., Wasino, & Sodiq, I. Dinamika Politik Partai Nahdlatul Ulama Di Semarang Tahun 1952-1979. *Journal of Indonesian History*, 7(1), (2018), 1–11.